

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

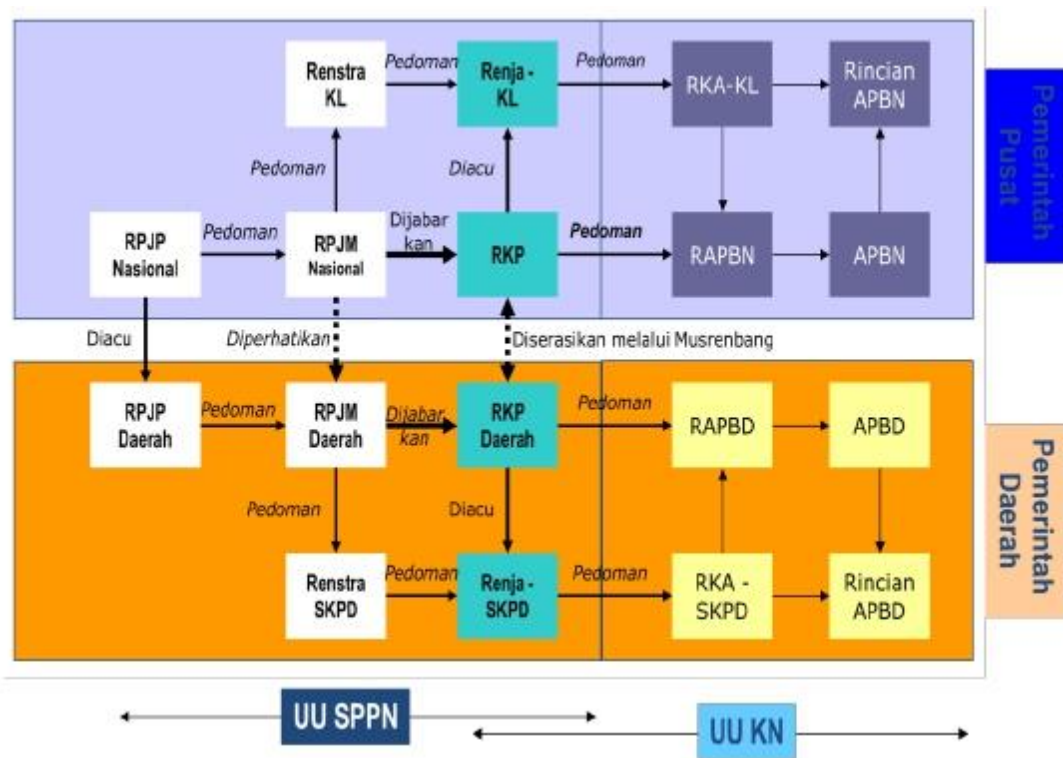
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah Kota Kediri merupakan rencana induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah akan mencapai tujuannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Nasional (Nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD, maka Dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 menjadi pedoman dalam *penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 (bagi OPD lama) atau Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2019(bagi OPD baru)*. Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional serta memperhatikan Renstra K/L, dalam hal ini (K/L sebutkan) sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Kedudukan dan ketertarikan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Bagan Alur Ketertarikan Dokumen Perencanaan



Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

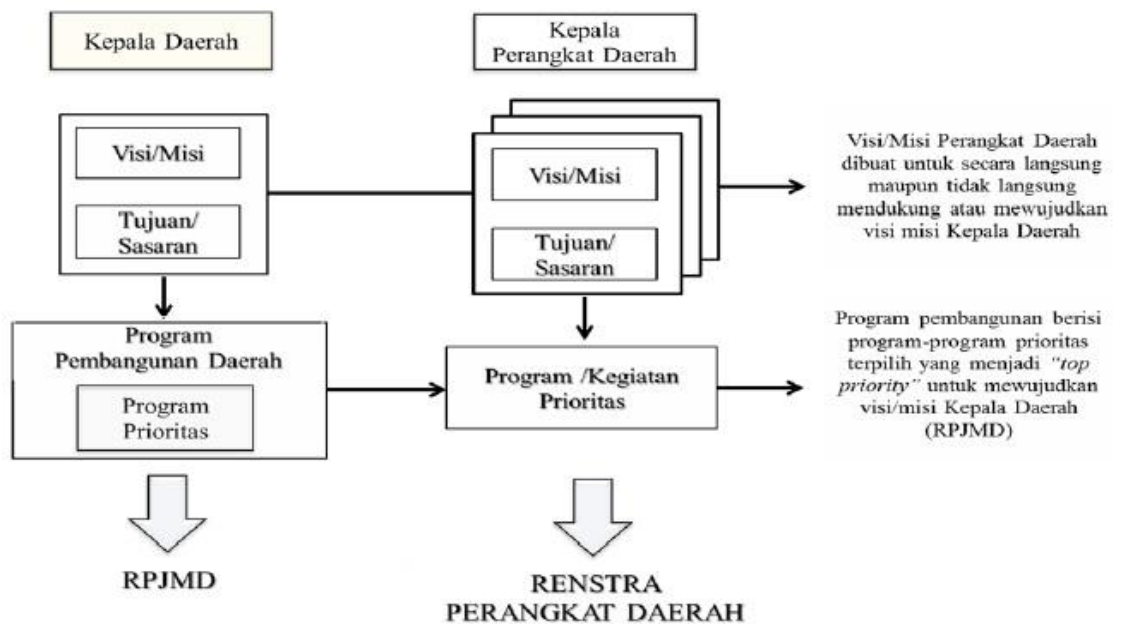
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.
13. Peraturan Perundang-undangan terkait tupoksi OPD dan K/L terkait

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Bagan 1.2.



Adapun tujuannya adalah

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) dan sebagai indicator evaluasi kinerja lima tahunan selama tahun 2015 – 2019.
2. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat.
4. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri sebagai organisasi perangkat daerah di bidang ***Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan dijabarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam Melaksanakan Program Dinas P3AP2KB dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai Tolak Ukur Kesuksesan Program Dinas P3AP2KB.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kota Kediri

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi (Perangkat Daerah) Kota Kediri

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ***Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ***Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas P3AP2KB mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaanevaluasidanpelaporandibidangpemberdayaanperempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaanadministrasidinasdibidangpemberdayaanperempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya;

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yangmenjadikewenangandaerah dibidangpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencanasertatugaspembantuan.

Tugas-tugas urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Kediri dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB yang dipimpin oleh pejabat eselon Dinas P3AP2KB dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
 - b. pelaksanaankoordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahanbidang pemberdayaan perempuandan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan pembinaan dan upaya peningkatan pengarusutamaan perempuan;
 2. Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang pemberdayaan perempuan;
 3. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan usaha ekonomi produktif;
 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
 5. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi gender;
 6. Pelaksanaan kualitas hidup perempuan; dan
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi danpartisipasi,pengasuhan,keluarga danlingkungan, kesehatan dankesejahteraan sertapendidikan,kreativitas dankegiatanbudaya;
 2. penyiapan forum koordinasi penyusunankebijakan pemenuhanhak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan,kesehatandankesejahteraan sertapendidikan,kreativitas dan kegiatanbudaya;
 3. penyiapan perumusankajiankebijakan pemenuhan hakanakterkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan sertapendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan sertapendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan sertapendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
8. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan;
9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan sertapendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk;
2. Pelaksanaan norma, standar dan prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan parameter pengendalian penduduk;
6. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk;
7. Peningkatan peran stakeholder dan mitra kerja dalam penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
8. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kota, kecamatan, kelurahan di Bidang Pengendalian Penduduk;

10. Pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam implementasi e-government dan desiminasi informasi;
11. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
12. Penguatan advokasi dan promosi KIE Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
13. Penguatan dan pengembangan/intensifikasi Kampung KB;
14. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB) dan kader KB;
15. Pelaksanaan koordinasi, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pada Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan;
16. Pendistribusian tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
17. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

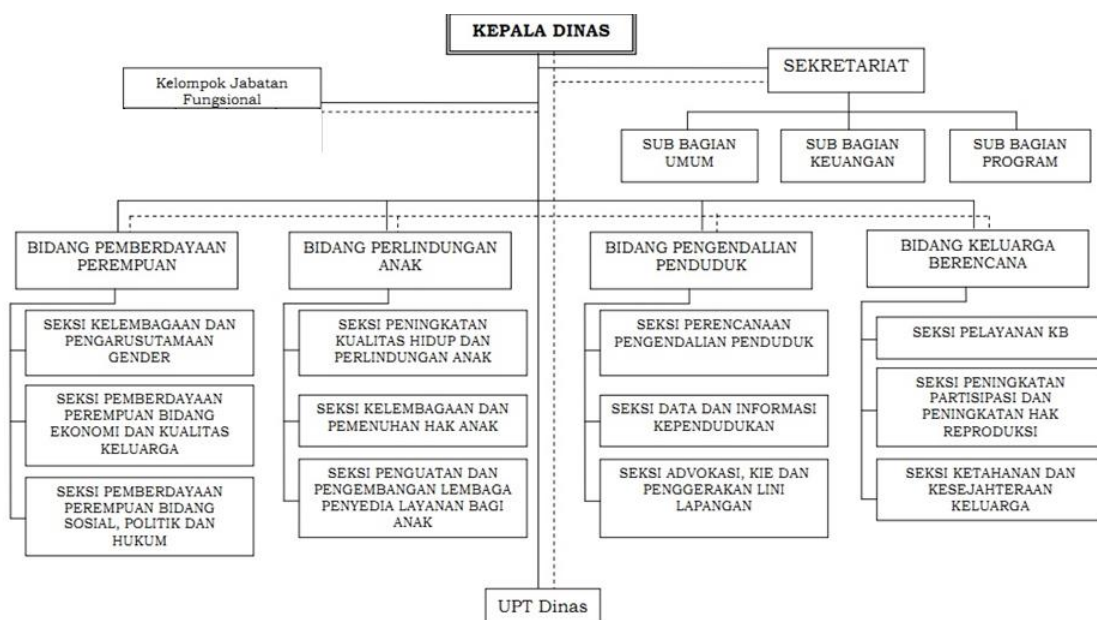
Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
2. penyelenggara dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
3. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB dirumah sakit skala kota;
4. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Un Meed Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
5. penyerasi dan penetapan kriteria sertakelayak tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
6. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sertakelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
7. pemantau tingkat dropout peserta KB;
8. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;

9. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
10. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
11. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
12. pembinaan penyuluhan KB;
13. peningkatan kesehatan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
14. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas dan merata di dalam skalakota;
15. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di skalakota;
16. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri di skalakota;
17. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi di skalakota;
18. pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kota Kediri



2.2 Sumber Daya Dinas P3AP2KB Kota Kediri

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang dimanfaatkan dalam rangka capaian tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dinas P3AP2KB berjumlah 98 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dinas P3AP2KB Kota Kediri Tahun 2017

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Kepala Sub Bidang	12
6	Penyuluh KB	26
7	Staf	20
Jumlah		67

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dinas P3AP2KB Kota Kediri

Tahun 2017

NO	JENIS PENDIDIKAN	SATUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S 3	Orang	-		-
2	S 2	Orang	4	10	14
3	S 1	Orang	16	18	34
4	D 3	Orang	4	-	4
5	SLTA	Orang	7	6	13
6	SLTP	Orang			
7	SD	Orang	2		2
	JUMLAH		33	34	67

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas P3AP2KB Kota Kediri
Tahun 2017

NO	GOLONGAN	SATUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV/c	Orang	1		1
2	IV/b	Orang	2	1	3
3	IV/a	Orang	3	16	19
4	III/d	Orang	9	7	16
5	III/c	Orang	1	2	3
6	III/b	Orang	6	3	9
7	III/a	Orang	2	0	2
8	II/d	Orang	1	2	3
9	II/c	Orang	3	2	5
10	II/b	Orang	1	2	3
11	II/a	Orang	3	0	3
12	I/d	Orang		-	
13	Tenaga Kontrak	Orang	21	8	29
	JUMLAH		53	43	96

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Dinas P3AP2KB Kota Kediri meliputi :

- Aset Bergerak terdiri dari : 5 Mobil Dinas dan 40 Sepeda Motor
- Aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Aset Tetap tahun 2017

no	jenis barang	jumlah barang	kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	pompa air	1	baik
2	Lemari besi	6	baik
3	filling besi/kabinet	10	baik
4	kursi tamu	1	baik
5	meja loby	1	baik
6	televisi	5	baik
7	camera digital	6	baik
8	komputer	6	baik
9	handphone	26	baik
10	laptop	6	baik
11	printer	33	baik
12	kursi kerja	3	baik
13	penampungan air	1	baik
14	buku ilmu pengetahuan	6	baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi OPD untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Kediri Tahun 2010 – 2014
(turunan dari sakip)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SP M	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun ke-2010	2011	2012	2013	2014	ke-2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	Laju Pertumbuhan Penduduk				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Rata-Rata jumlah Anak yang dilahirkan (TFR)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	Cakupan Peserta KB Aktif		72,88		72,73	72,79	72,84	72,88	72,91	72,88	72,96	73,04	73,02	-	100,21 %	100,23 %	100,27 %	100,19 %	99,28 %
4	Persentase Jumlah wanita Kawin Usia dibawah 20 thn		0,23%		0,27%	0,25 %	0,24 %	0,23 %	0,22 %	0,37 %	0,58 %	0,56 %	0,72 %	-	137,04 %	232,00 %	233,33 %	313,16 %	0,53%
5	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I		16,77		16,57	16,03	16,64	16,77	16,89	13,870	13,64	13,82	13,52	-	119,47 %	117,53 %	120,41 %	124,04 %	240,91%
6	Persentase Partisipasi Angkatan kerja perempuan		90%		60%	70%	80%	90%	100%	54,35 %	85,94 %	85,94 %	84,88 %	-	90,58%	122,77 %	107,43 %	94,32%	94,55 %
7	PKK Aktif				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	Rasio KDRT		3,00%		2,0%	2,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	0,28 %	0,020 %	0,015 %	0,018 %		14,00%	1,00%	0,50%	0,59%	6,67%

9	Presentase kejadian kasus KDRT yang difasilitasi		100%							100,00%	100%	100%	100%						
10	Presentase Capaian Indikator Kota Layak Anak																		

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Dinas P3AP2KB

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rentra perode sebelumnya.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (OPD) Kota Kediri Tahun 2010 – 2014

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA LANGSUNG		1.214.590.000	1.692.138.000	7.869.029.400	4.914.303.970		198.860.782	1.571.394.272	7.273.442.047	4.055.715.948
BELANJA PEGAWAI		273.379.000	550.100.000	4.976.584.000	681.832.000		269.404.000	539.916.000	4.548.521.373	599.047.500
BELANJA BARANG & JASA		813.851.000	1.110.944.000	1.881.630.400	3.202.157.250		805.656.782	1.002.263.272	1.769.920.674	2.611.380.488
BELANJA MODAL		127.360.000	31.094.000	1.010.815.000	1.030.314.720		123.800.000	29.215.000	955.000.000	845.288.000

Tabel 2.7

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan

Dinas P3AP2KB Kota Kediri Tahun 2010 – 2014

Uraian ***)	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Realisasi:Anggaran)x 100%					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA LANGSUNG		16%	93%	92%	83%	0,20	0,20
Belanja Pegawai		99%	98%	91%	88%	0,20	0,20
Belanja Barang dan Jasa		99%	90%	94%	82%	0,20	0,20
Belanja Modal		97%	94%	94%	82%	0,20	0,20

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Dinas P3AP2KB Kota Kediri selama periode 2010 – 2014dst. Hal ini menunjukkan bahwadst. (interpretasi dari hasil pengisian tabel di atas yang mencakup (2.6) ada/tidaknya gap pelayanan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan/hambatan dan (2.7) rasio mana yang dikatakan baik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kota Kediri

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program pelayanan administrasi perkantoran	276.395.034	424.639.000	365.012.000	510.438.500	655.585.200	271.990.124	416.213.782	306.034.172	471.066.054	193.119.251	98%	98%	84%	92%	29%	446.413.946	331.684.677
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.002.000	46.035.000	68.000.000	1.469.141.470	1.469.141.470	28.002.000	45.370.000	58.773.300	953.317.370	128.169.150	100%	99%	86%	92%	9%	616.063.988	242.726.364
Prog. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.740.000	1.800.000	3.600.000	4.800.000	30.000.000	10.740.000	1.800.000	3.600.000	4.800.000	-	100%	100%	100%	100%	0%	10.188.000	4.188.000
Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000.000	9.030.000	10.000.000	10.000.000	43.420.000	3.000.000	9.030.000	9.970.000	9.876.500	-	100%	100%	100%	99%	0%	13.090.000	6.375.300
Prog. Keserasian	153.065.200	140.000.000	395.340.000	793.472.500	1.027.945.500	141.299.200	139.687.500	352.120.500	730.105.500	245.547.000	92%	100%	89%	92%	24%	501.964.640	321.751.940

kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan																	
Program Keluarga Berencana	374.622.925	363.168.000	434.486.000	925.525.000	932.360.000	368.346.525	357.578.000	426.166.300	923.019.250	292.562.000	98%	98%	98%	100%	31%	606.032.385	473.534.415
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	46.309.200	-	35.000.000	193.780.000	-	46.155.200	-	34.925.000	193.780.000	-	100%	0%	100%	100%	0%	91.696.400	91.620.067
Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-tamayan Gender dan Anak		100.000.000	-	-			99.313.500	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%	100.000.000	99.313.500
Program kesehatan reproduksi remaja	53.409.000	75.918.000	20.000.000	40.810.000	70.000.000	53.190.900	75.868.000	19.330.000	40.810.000	57.160.000	100%	100%	97%	100%	82%	52.027.400	49.235.380
Prog. Pelayanan kontrasepsi	48.320.000	14.000.000	311.700.000	149.390.000	361.985.900	46.790.000	14.000.000	311.550.000	144.189.500	67.584.100	97%	100%	100%	97%	19%	177.079.180	116.822.720
Prog. Peningkatan kualitas hidup dan		15.000.000	-	-	203.677.500		15.000.000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	109.338.750	7.500.000

perlindungan perempuan																		
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Koseling KRR					90.188.400					12.610.000	0%	0%	0%	0%	14%	90.188.400	12.610.000	
Prog. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	33.532.500	25.000.000	49.000.000	20.000.000	30.000.000	33.032.500	25.000.000	48.925.000	20.000.000	-	99%	100%	100%	100%	0%	31.506.500	25.391.500	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3AP2KB

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD(dikaitkan dengan analisis terhadap renstra K/L dan Renstra Perangkat Provinsi). Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan OPD kedepannya.

➤ Tantangan :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibanya;
2. Melalui Program pemberdayaan perempuan yang pelaksanaannya dengan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana strategis yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sehingga akan terwujud kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Progam keluarga berencana sebagai salah satu prioritas pembangunan di kota Kediri, dimana progam ini merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
4. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pembinaan keluarga berencana dan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB dimana kegiatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan keluarga sejahterta.
5. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi tren buruk masa sekarang, serta perlu penanganan khusus terhadap anak.
6. Untuk mendapatkan data terpilah gender dan anak, kependudukan yang tervalidasi perlu adanya penggalian dan pengumpulan data secara berkala guna mendapatkan data kependudukan yang valid.

➤ Peluang :

1. Tersedianya honorarium bagi Satgas PPA yang ada di setiap Kelurahan di Kota Kediri.
2. Tersedianya Mobil Unit Penerangan (MUPEN) sebagi sarana KIE dalam mensosialisasikan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Minat masyarakat untuk pelayanan KB cukup tinggi.
4. Meningkatnya pemahaman SDM tentang peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak dan mengurangi kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

5. Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera) untuk pengembangan usaha, dan membina kader kader tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) minimal 3 tahun dan partisipasi keluarga untuk ikut kegiatan tribina.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS P3AP2KB KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis OPD. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi OPD sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Beberapa permasalahan pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bidang Pemberdayaan Perempuan

- Belum optimalnya OPD dalam melaksanakan PUG
- Belum optimalnya peningkatan Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga (35,11%)
- Belum adanya pemberdayaan perempuan terutama kelompok lansia perempuan
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan terhadap perempuan penyandang disabilitas;

3.1.2 Bidang Perlindungan Anak

- Perlu peningkatan P2TP2A, peningkatan pembinaan satgas PPA.
- Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kota layak anak
- Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
- Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
- Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
- Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
- Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak
- Masih cukup tingginya kasus kekerasan terhadap anak
- Adanya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- Masih adanya pekerja anak
- Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
- Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
- Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

3.1.3 Bidang Pengendalian Penduduk

- Relatif tingginya angka kelahiran
- Banyaknya penduduk dari luar kota yang migrasi ke kota Kediri karena daerah Kota Kediri memiliki daya tarik sosial ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah sekitarnya
- Belum optimalnya penyediaan data mikro di kelurahan
- Kurang optimalnya fungsi Kampung KB.

3.1.4 Bidang Keluarga Berencana

- Menekan laju Pertumbuhan Penduduk
- Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal ;
- Terbatasnya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB sebagai dampak banyaknya petugas yang purna tugas dan alih peran yang sangat berpengaruh dalam operasional tugas bidang KB di lapangan ;
- Kurang optimalnya Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja;
- Kurangnya akses permodalan kelompok UPPKS untuk pengembangan usaha, serta masih rendahnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera);
- Belum optimalnya peran kader TRIBINA (BKB,BKR,BKL) di tingkat kelurahan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Dearah terpilih Periode 2014-2019 adalah **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”**.Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri guna mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih, maka Dinas P3AP2KB sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Dinas P3AP2KB berperan dalam merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas P3AP2KB yang berpengaruh sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A.
3. Mempunyai jaringan sampai ke tingkat RT dan tribina minimal selama 3 tahun.
4. Komitmen yang kuat secara politis dan pragmatis.
5. Secara bertahap dukungan dana operasional , pengadaan obat dan kontrasepsi meningkat.
6. Pemerintah propinsi kab/kota berusaha untuk melaksanakan semua program KB dan kependudukan yang ada, walaupun bentuk lembaganya bervariasi.
7. Meningkatnya sarana dan prasarana kota layak anak.
8. Memberdayakan kembali karang taruna di setiap kelurahan sehingga mampu bermitra dengan kelompok PIK R jalur mandiri.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan program KB di beberapa daerah masih tergantung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Penataan petugas yang belum tuntas utamanya PKB/PLKB berakibat terjadi penurunan kinerja program KB.
3. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
4. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender.
5. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Jumlah penduduk cukup tinggi namun kualitas masih rendah.
7. TFR stagnan, unmet need masih tinggi dan CPR meningkat sedikit.
8. Belum optimalnya program koalisi kependudukan.
9. Kurang optimalnya satgas PPA di setiap kelurahan.
10. Kurang adanya partisipasi dalam kegiatan kelompok PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) jalur masyarakat di setiap kelurahan.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Kediri dipandang perlu untuk memperhatikan Renstra Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan Pada periode 2014 -2019 adalah “ **Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan berakhlak** “. Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, dijabarkan melalui Misi yaitu “ **Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat**”. Pada bagian ini dikemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Menelaah visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas P3AK yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur. Adapun isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	I			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MDGs Goal 1a,1b,1c: Menanggulangi Kemiskinan dan kelaparan	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi tingkat kemiskinan, yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional, dari 13.33% pada tahun 2010, menjadi 8-10% pada tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan 	
2	MDGs Goal 3,3.1, 3.2 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang bias gender 	
3	Human Trafficking	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerja yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sector pembangunan 	
4	Gender Empowerment Measurement (GEM)	<ul style="list-style-type: none"> Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilih di masing-masing SKPD 	
5	Gender related Development Index (GDI)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak 	

6	MDGs Goal 5b: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Total Fertility Rate (TFR) meningkat dari 2,3 (SDKI 2007) menjadi 2,6 (SDKI 2012) • Promosi dan pergerakan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendah tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). • Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi. • Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga 	
---	---	--	---	--

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD terkait di Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara renstra (OPD) Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra OPD terkait di Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Kediri berdasarkan Renstra (OPD) Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L BKKBN	Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki sebesar Rp14.150 ribu per bulan, dan Rp 8.316 ribu per bulan untuk penduduk perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan - Belum tersedianya data terpilah 	Belum optimalnya peningkatan Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga (35,11%)	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2.	Belum semua Puskesmas di Indonesia termasuk kategori Puskesmas ramah anak	Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan	Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak	Meningkatkan capaian kota layak anak (status pratama)	Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak anak

		<p>memenuhi hak-hak dasar perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 	masih terbatas		
3.	Belum semua sekolah di Indonesia termasuk kategori sekolah ramah anak.	<p>Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas	Meningkatkan capaian kota layak anak (status pratama)	Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak anak
4.	Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS	Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.	Belum optimalnya penyediaan data mikro di kelurahan	Belum optimalnya program koalisi kependudukan	Pemerintah propinsi kab/kota berusaha untuk melaksanakan semua program KB dan kependudukan yang ada, walaupun bentuk lembaganya bervariasi
5.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki. 2. Kurangnya alat kontrasepsi KB 3. Kurang signifikannya kenaikan 	Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal ;	Jumlah penduduk cukup tinggi namun kualitas masih rendah	Secara bertahap dukungan dana operasional , pengadaan obat dan kontrasepsi meningkat

		<p>contraseptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif</p> <p>4. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need</p> <p>5. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan</p> <p>6. Sarana dan Prasarana terbatas.</p> <p>7. Terbatasnya anggaran</p> <p>8. Kompetensi SDM terbatas</p> <p>9. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).</p> <p>10. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.</p>			
6.	<p>Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga</p>	<p>1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki.</p> <p>2. Kurangnya alat kontrasepsi KB</p> <p>3. Kurang signifikannya kenaikan contraseptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif</p> <p>4. Belum terpenuhinya pelayanan unmet need</p> <p>5. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan</p> <p>6. Sarana dan Prasarana terbatas.</p> <p>7. Terbatasnya anggaran</p> <p>8. Kompetensi SDM terbatas</p> <p>9. Rendahnya kesadaran masyarakat</p>	<p>Kurang optimalnya Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja;</p>	<p>TFR stagnan, unmet need masih tinggi dan CPR meningkat sedikit</p>	<p>Secara bertahap dukungan dana operasional , pengadaan obat dan kontrasepsi meningkat</p>

		tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). 10. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.			
--	--	--	--	--	--

1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah pada rentra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan (OPD) Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **“Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing”**.

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
- Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
- Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
- terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
- terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri beserta faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Identifikasi berdasarkan telaah RTRW Kota Kediri 2011-2030

No	Kebijakan RTRW Kota Kediri	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
.				

		Kediri		
1	pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup	Lembaga KB yang digabung belum dapat menampung totalitas	Kurangnya jumlah zona selamat sekolah.	Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari pemerintah daerah
2	pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Masih terbatasnya fasilitas pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Kota Kediri
3.	pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi	Masih tingginya jumlah pernikahan usia muda.	Sumber Daya Manusia yang relative masih rendah	Adanya peningkatan sektor usaha yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Kediri

Berdasarkan telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Kediri di dapat beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Dinas P3AP2KB sebagai berikut :

1. masih kurangnya pemanfaatan lahan untuk meningkatkan capaian kota layak anak.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas

Dinas P3AP2KB Kota Kediri dalam perencanaan programnya perlu disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi program, sehingga lokasi dan kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan.

1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas P3AP2KB maka isu strategis dalam Renstra Dinas P3AP2KB Kota Kediri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

No	Isu Strategis	Uraian/kendala

1	Masih minimnya SDM tentang pemahaman peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	seringnya mutasi pejabat yg menyebabkan SDM melakukan penyesuain dan pembelajaran tentang pemahaman peraturan perlindungan perempuan dan anak, Peraturan perundang-undangan masih banyak yang bias gender dan / atau diskriminatif terhadap perempuan
2	Masih banyaknya kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan	Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Umumnya korban malu dan takut untuk melaporkan kejadian yg menimpa mereka
3	Masih kurangnya peranan dan koordinasi organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan Perempuan dan Anak	kerjasama antar organisasi baik pemerintah maupun swasta kurang optimal,rendahnya tingkat kesadaran dalam memberikan informasi data
4	Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusatamaan Gender (PUG) serta belum maksimalnya kinerja Pokja PUG Kota Kediri	Sejalan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah terutama yang menangani masalah – masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu – kenali masalah-masalah gender yang ada.
5	Menekan laju pertumbuhan penduduk	<p>Laju pertumbuhan penduduk propinsi jawa timur 2000-2010 adalah 0,76 %, menurut kepala BKKBN Pusat menyatakan saat ini setiap tahun penduduk Indonesia bertambah 4 juta jiwa. Data sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa. Masih menurut kepala BKKBN idealnya laju pertumbuhan penduduk dibawah 1%, sementara LPP di Indonesia saat ini mencapai 1,49% - 1,5%. Hal ini tidak menunjukkan penurunan melainkan justru mengkhawatirkan. Untuk target akhir 2014 adalah 1,27%.</p> <p>Kota Kediri laju pertumbuhan penduduk tahun 2011-2012 adalah 3,09%. LPP untuk tahun 2013 adalah 2,62%. Laju pertumbuhan penduduk ini utamanya di dorong oleh faktor relatif tingginya angka kelahiran dan faktor migrasi penduduk dari luar kota Kediri karena daerah Kota Kediri memiliki daya tarik social ekonomi yang relative lebih baik dibandingkan daerah-daerah sekitarnya.</p>

6	Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal	Salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan digalakkannya program KB yang salah satu nya adalah kontrasepsi mantap MOP. Minat masyarakat terhadap program KB MOP masih rendah, ini dikarenakan di dalam masyarakat masih adanya mitos bahwa MOP dapat mengurangi libido
7	Terbatasnya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB sebagai dampak banyaknya petugas yang purna tugas dan alih peran yang sangat berpengaruh dalam operasional tugas bidang KB di lapangan	Dukungan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sangat diperlukan untuk melengkapi data administrasi dan mempromosikan program dan kegiatan KB, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan sesuai target. Tetapi jika jumlah tenaga fungsional PLKB terbatas menyebabkan beban kerja yang tinggi sehingga kualitas kerja yang dihasilkan kurang optimal
8	Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang optimal	Seiring dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi, pergaulan dikalangan remaja semakin sulit terkendali. Sementara pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat terbatas, sehingga pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan,aborsi bahkan penyakit menular seksual (PMS) marak dikalangan remaja. Untuk itu sangat diperlukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja di masyarakat pada umumnya dan lembaga pendidikan pada khususnya.
9	Kurangnya akses permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS untuk pengembangan usaha, serta masih kurangnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);	Untuk meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya keluarga pra-sejahtera dibentuklah kelompok UPPKS dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan pelatihan, ketrampilan dan pelatihan manajemen kelompok UPPKS. Dengan terbatasnya permodalan dan kurang maksimalnya akses pemasaran akibat masih kurangnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS, diharapkan kedepan BPPKB Kota Kediri lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kelompok UPPKS.
10	Sering berganti gantinya kader tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan patisipasi keluarga untuk ikut kegiatan tribina	Salah satu peran penting dalam pembinaan dan sosialisasi tentang kualitas sumber daya manusia mulai dari balita, remaja dan lansia adalah peranan kader sangat penting. Untuk menjadi kader tribina minimal 3 tahun , sementara banyak kader yang belum sampai 3 tahun sudah berganti dengan kader yang lain dengan berbagai alasan. Sehingga banyak kader yang aktif dengan beban tugas yang rangkap,membuat kader tribina menjadi kurang optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”**. Sesuai dengan harapan dari visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan Kota Kediri sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain:

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. *Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :*
 - a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 - c. Meningkatnya integrasi aparatur pemerintah daerah;
 - d. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat;
 - e. Meningkatnya penerapan e-Governance;

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan, memiliki tujuan:

1. *Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan. Sasaran dari tujuan ini adalah :*
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
 - b. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang.
2. *Mewujudkan kota yang nyaman. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan.*

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan, memiliki tujuan:

1. *Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sasaran dari tujuan ini adalah :*
 - a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat kemiskinan
2. *Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya. Sasaran dari tujuan ini adalah:*

- a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif, memiliki tujuan:

1. *Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi.* Sasaran dari tujuan ini adalah:
 - a. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah;
 - b. Meningkatnya jumlah investasi;
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
 - d. Meningkatnya daya tarik wisata.
2. berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2014-2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan mengutamakan nilai-nilai kesetaraan Gender.
2. Memperkuat sistem dan meningkatkan kapasitas perlindungan anak.
3. Mengembangkan jejaring kemitraan dan pengelolaan kependudukan.
4. Meningkatkan peserta KB aktif dan Penundaan Usia Perkawinan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi (Nomor 3) Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi **“Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan”**, sasaran ke (Nomor 2) yang berbunyi **“Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak”**.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Dalam hal ini Dinas P3AP2KB Kota Kediri diharapkan menjadi Dinas yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Masyarakat Kota Kediri, sehingga Visi dan Misi pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas P3AP2KB Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terciptanya wanita yang aktif dan berkualitas dalam keluarga yang sejahtera.
2. Terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya perlindungan perempuan.
3. Terciptanya kota layak anak di kota Kediri.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak .
5. Meningkatkan kinerja Kader PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Kediri.
6. Terciptanya kualitas data kependudukan yang valid.
7. Meningkatnya kesertaan ber- KB
8. Menurunnya wanita kawin dibawah usia 20 th

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.1

MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN (TUJUAN OPD)	INDIKATOR SASARAN (IKD)	SASARAN (OPD)	INDIKATOR KINERJA (OPD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan	Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Terciptanya wanita yang aktif dan berkualitas dalam keluarga yang sejahtera. 2. Terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya perlindungan perempuan.	1. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Pkk Aktif 2. Rasio KDRT 3. Persentase kejadian kasus KDRT yang difasilitasi
				Prosentase Capaian Indikator Kota Layak Anak	1. Terciptanya kota layak anak di kota Kediri. 2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak .	1. Prosentase Capaian Indikator Kota Layak Anak 2. Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart
				Laju pertumbuhan penduduk (%)	Meningkatnya kesertaan ber- KB	1. Laju pertumbuhan penduduk

					2. Cakupan peserta KB aktif
			Cakupan peserta KB aktif(%)	Meningkatnya kesertaan ber- KB	1. Laju pertumbuhan penduduk 2. Cakupan peserta KB aktif
			Persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun (%)	Menurunnya wanita kawin dibawah usia 20 th	Presentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 th

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya mengenai kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB periode 2010-2014 telah ditunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja untuk OPD dengan dokumen renstra yang baik telah mencapai 90% maka pada periode ini untuk indikator yang sama, Dinas P3AP2KB meningkatkan standar mutu dan penilaian dari dokumen perencanaan, sehingga target yang di tetapkan dimulai dari 95 % Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas yang sesungguhnya.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Dinas P3AP2KB Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas P3AP2KB, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi			
MISI III :Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya wanita yang aktif dan berkualitas dalam keluarga yang sejahtera. 2. Terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya perlindungan perempuan. 	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengarusutamaangender dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat dan advokasi kelembagaan. b. Peningkatankapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak c. memfasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas organisasi perempuan 2. Meningkatkan pemberdayaan ,kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, advokasi perempuan dan anak korban kekerasan, advokasi perlindungan hak-hak anak serta mendorong terwujudnya kota layak anak
Prosentase Capaian Indikator Kota Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kota layak anak di kota Kediri. 2. Meningkatkan pelayanan dan 	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengarusutamaangender dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat dan advokasi kelembagaan.

	perlindungan terhadap anak .	tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak c. memfasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas organisasi perempuan <p>2. Meningkatkan pemberdayaan , kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, advokasi perempuan dan anak korban kekerasan, advokasi perlindungan hak-hak anak serta mendorong terwujudnya kota layak anak</p>
Laju pertumbuhan penduduk (%)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesertaan ber- KB 2. Menurunnya wanita kawin dibawah usia 20 th 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk 2. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi Remaja dan keluarga berencana 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan keluarga berencana pemberdayaan perempuan 2. Mempromosikan program KB sampai kepada tingkat kepala keluarga untuk mendorong terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 3. Memantapkan pemahaman 4 pilar program KB (PUP, Pengaturan Kelahiran, Ketahanan Keluarga, peningkatan Kesejahteraan Keluarga) serta penguatan 4. Memberikan sistem pelayanan KB sesuai standar dalam upaya mengendalikan kependudukan terpadu 5. Meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja/KRR
Cakupan peserta KB aktif(%)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesertaan ber- KB 2. Menurunnya wanita kawin dibawah usia 20 th 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan keluarga berencana pemberdayaan perempuan 2. Mempromosikan program KB sampai kepada tingkat kepala keluarga untuk

		<p>laju pertumbuhan penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi 3. Remaja dan keluarga berencana 	<p>mendorong ter kendalinya laju pertumbuhan penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memantapkan pemahaman 4 pilar program KB (PUP, Pengaturan Kelahiran, Ketahanan Keluarga, peningkatan Kesejahteraan Keluarga) serta penguatan 4. Memberikan sistem pelayanan KB sesuai standar dalam upaya mengendalikan kependudukan terpadu 5. Meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja/KRR
<p>Persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun (%)</p>	<p>Terciptanya Keluarga yang sehat dan sejahtera.</p>	<p>Peningkatan motivasi dan kesadaran kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana dan keluarga sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan 2. Memfasilitasi penguatan profesionalisme tenaga penyuluh

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri ditentukan program-program pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan SOTK
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja dan pendanaan dalam perubahan renstra ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas P3AP2KB

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Kota Kediri dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian misi ke (03) RPJMD Kota Kediri 2014-2019 yakni Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan serta sasaran RPJMD Kota Kediri 2014-2019 antara lain :

1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam pencapaian sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai Sakip Kota Kediri. Secara umum Indikator Kinerja OPD Kota Kediri menerapkan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA (OPD)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian			Kondisi Akhir RPJMD
	2013 (base line)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Capaian Indikator Kota Layak Anak	0%	0%	54,84%	54,84%	50%	60%	70%	70%
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,96		0,96	0,70	0,93	0,92	0,91	0,91
Cakupan peserta KB aktif(%)	73,02		72,90	68,87	73,2	73,25	73,30	73,30
Persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun (%)	0,63	0,53	0,42	0,51	0,51	0,48	0,45	0,45

**LIHAT FILE EXCEL LAMPIRAN BAB IX
 RPJMD 2014-2019 (REVISI)**

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis DINAS P3AP2KB Kota Kediri Tahun 2014-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DINAS P3AP2KB dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran DINAS P3AP2KB yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019. Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang ingin dicapai.

Rencana Strategis DINAS P3AP2KB ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja.